

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001, orientasi penyelenggaraan pemerintah daerah telah bergeser dari ketergantungan pada pemerintah pusat kepada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun daerah menuju kesejahteraan masyarakat.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terletak pada pemerintah kabupaten/kota yang merupakan tingkat pemerintahan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, fungsi utama pemerintah kabupaten / kota pada hakekatnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik adanya sisi positif atas penerapan otonomi daerah, tetap saja terdapat adanya sisi negatif yang mengakibatkan kekhawatiran munculnya desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan, artinya pelimpahan beberapa wewenang dari pusat di daerah juga disertai dengan pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu ditangani dan diselesaikan oleh pemerintah pusat. Menurut UU No.32/2004 (2004:5). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Otonomi daerah identik dengan tuntutan akuntabilitas, *good governance*, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dapat mempertanggung jawabkan kepercayaan masyarakatnya secara jujur (Enho, 2008:2). Tuntutan *good governance*, maka salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan Presiden dan Gubernur / Bupati / Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban dalam bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Enho (2008), meneliti tentang Pengaruh Pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar Belakang Pendidikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan. Penelitian yang dilakukan oleh Enho (2008) pada pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif, serta latar belakang pendidikan

mempunyai hubungan positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel independent yaitu pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan memberikan hasil yang signifikan dengan objek penelitian Pemerintah Kota Binjai.

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah dengan penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Era reformasi dengan tuntutan transparansi yang semakin meningkat, maka peran akuntansi semakin dibutuhkan, tidak saja untuk kebutuhan pihak manajemen suatu entitas, tetapi juga untuk kebutuhan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada banyak pihak yang memerlukan. Hal ini mengharuskan suatu entitas untuk penyediaan informasi termasuk laporan keuangan.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik dan benar, yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan presiden dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 pada bagian Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan (2005:2). Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan

pemerintah. Namun Roesyanto, menyatakan bahwa rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu PP. No.24 Tahun 2005, mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sehubungan dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan faktor pemahaman terhadap SAP agar hasil dari laporan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemahaman terhadap SAP, faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan terhadap perangkat yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan yang dimaksud dilihat dari dua sisi, yaitu latar belakang pendidikan dan strata pendidikan. Dengan memperhatikan pendidikan dari perangkat SKPD, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP, sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan fenomena atas penelitian oleh King dalam Effendi (2005) tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa daerah seperti Kota/Kab di Indonesia, menyimpulkan bahwa : Penempatan PNS sering tidak sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut menurut Menpan (2006) Tingkat Pendidikan Birokrasi Negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA kebawah dan rendah tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi inovasi dan kreatifitasnya dalam mengambil keputusan. Hal ini tentu sangat memprihatkan di mana seharusnya dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya yang benar-benar berkualitas.

Selain itu perlu juga diperhatikan faktor pelatihan dalam mendukung perangkat SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Pelatihan ini dimaksudkan agar perangkat SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan

keuangan daerah karena telah terbiasa melalui adanya pelatihan. Hal tersebut senada dengan pendapat Latoirner dalam Saksono (1993) bahwa para pegawai dapat berkembang lebih pesat dan lebih baik serta bekerja lebih efisien apabila sebelum bekerja mereka menerima latihan di bawah bimbingan dan pengawasan seorang instruktur yang ahli serta Dessler (1995) yang menyatakan bahwa kebutuhan pendidikan dan pelatihan (*training need*) bagi suatu organisasi pada hakekatnya muncul dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengganggu kinerja organisasi itu seperti penurunan prestasi. Begitu juga dengan Simanjuntak (1983:226) dalam Kurnia (2005) yang menyatakan bahwa. Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat dan tepat”. Namun Menpan (2005) menyatakan “pendidikan dan pelatihan pegawai yang berlaku dewasa ini bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan”. Akhirnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan SAP dalam sebuah skripsi dengan judul “ **Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kota Binjai**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penerapan SAP pada pemerintah Kota Binjai.

- b. Apakah pelatihan - pelatihan terhadap penerapan SAP pada Pemerintah Kota Binjai
- c. Apakah pemahaman Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap penerapan SAP pada Pemerintah Kota Binjai.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka perlu dilakukan pembatasan masalah , yaitu : Penelitian ini dibatasi oleh aspek akuntansi sektor publik untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintahan Kota Binjai.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang serta fakta-fakta di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Apakah pemahaman SAP, pelatihan, dan latar belakang pendidikan mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kota Binjai”

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Apakah pemahaman SAP, pelatihan, dan latar belakang pendidikan mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Pemerintah Kota Binjai

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang menjadi kendala penerapan SAP.
- b. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

